

CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA

PADA LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA

**UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA BARANG PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKARAYA
BAGIAN ANGGARAN 005.04
TAHUN 2019**

I. Pendahuluan

a. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana yang telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan No. 171 Tahun 2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007 tentang Tatacara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindah tanganan Barang Milik Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 Tahun 2007 tentang Kodifikasi Barang Milik Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-51/PB/2008 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
13. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor MA/SEK/055/X/2008 tanggal 28 Oktober 2008 tentang Pendelegasian Wewenang Permohonan Penghapusan Kepada Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung RI;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2009 dan Peraturan Dirjen KN 07/KN/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
15. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 07 Tahun 2009 tentang Cara Pelaksanaan Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
16. Peraturan Bersama Menteri Keuangan Dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 186/PMK.06/2009 Nomor: 24 Tahun 2009 Tentang Pensertipikatan Barang Milik Negara Berupa Tanah;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

b. Entitas Pelaporan

Entitas pelaporan adalah Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya yang merupakan bagian dari instansi Mahkamah Agung Republik Indonesia, bagian anggaran Badan Urusan Administrasi.

c. Periode Pelaporan

Catatan atas Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang ini merupakan pelaporan atas periode Tahun Anggaran 2019.

II. Kebijakan Penatausahaan Barang Milik Negara

Pada dasarnya kebijakan akuntansi Barang Milik Negara (BMN) dan Pelaksanaan pelaporannya dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah dan Sistem Akuntansi Instansi, hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171 Tahun 2007 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Barang adalah bagian dari kekayaan negara yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai/dihitung/diukur dan ditimbang, tidak termasuk uang dan surat berharga. Menurut Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

BMN memiliki jenis dan variasi yang sangat beragam, baik dalam hal tujuan perolehannya maupun masa manfaat yang diharapkan. Oleh karena itu, dalam perlakuan akuntansinya ada BMN yang dikategorikan sebagai aset lancar dan ada pula yang di golongan sebagai aset tetap bahkan aset lainnya.

BMN yang dikategorikan sebagai aset lancar apabila diharapkan segera dipakai atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. BMN yang memenuhi kriteria ini diperlakukan sebagai Persediaan.

BMN yang dikategorikan sebagai aset tetap apabila mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal Kuasa Pengguna Barang, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. BMN yang memenuhi kriteria tersebut bisa meliputi Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi, dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; serta Konstruksi dalam Pengerjaan.

BMN berupa aset tetap yang sudah dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah digolongkan sebagai aset lain-lain. Dalam sistem akuntansi pemerintah pusat, kebijakan akuntansi BMN mencakup masalah pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan.

III. Pendekatan Penyusunan Laporan

Laporan Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya Tahun Anggaran 2019 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek BMN yang ditatausahakan dan dikelola oleh Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya.

Nilai BMN gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) yang disajikan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya ini adalah sebesar Rp. 591.151,00 (*lima ratus sembilan puluh satu ribu seratus lima puluh satu rupiah*).

Laporan BMN ini disusun menggunakan sistem aplikasi sebagai alat bantu guna mempermudah dalam melakukan Penatausahaan BMN. Laporan BMN ini terdiri atas:

1. Neraca;
2. Laporan Barang Persediaan;
3. Laporan Aset Tetap (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, dan Gabungan);
4. Laporan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
5. Laporan Aset Tak Berwujud;
6. Laporan Barang Bersejarah;
7. Laporan Kondisi Barang;
8. Laporan Penyusutan;
9. Laporan Barang Hilang Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang;
10. Laporan Barang Rusak Berat Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang;
11. Laporan Barang Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS);
12. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara;
13. Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) internal SAIBA-SIMAK pada Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya;
14. Laporan PNPB yang terkait dengan pengelolaan BMN; dan
15. Arsip Data Komputer (ADK).

IV. Ringkasan Barang Milik Negara per 31 Desember 2019

1. Saldo Awal TA 2019

Nilai BMN per 31 Desember 2019 menurut Laporan Barang Pengguna Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya adalah sebesar Rp. 591.151,00 (*lima ratus sembilan puluh satu ribu seratus lima puluh satu rupiah*) yang terdiri dari nilai BMN intrakomptabel sebesar Rp. 591.151,00 (*lima ratus sembilan puluh satu ribu seratus lima puluh satu rupiah*) dan nilai BMN ekstrakomptabel sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).

Tidak terdapat perubahan penyajian saldo awal dalam penyajian laporan ini dengan saldo akhir periode sebelumnya yang menjadi saldo awal periode berjalan.

2. Ringkasan Mutasi Barang Milik Negara

Mutasi BMN per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut :

a. Barang Persediaan

Saldo persediaan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 591.151,00 (*lima ratus sembilan puluh satu ribu seratus lima puluh satu rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 883.553 (*delapan ratus delapan tiga puluh ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah*) dan total mutasi persediaan selama periode laporan sebesar Rp. 292.402 (*dua ratus sembilan puluh dua ribu*).

Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

Uraian	Saldo Awal (Rp.)	Mutasi (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
Barang Konsumsi	883.553	292.402	591.151
Amunisi	0	0	0
Bahan Untuk Pemeliharaan	0	0	0
Suku Cadang	0	0	0
Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0	0
Aset Tetap atau Persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	0	0	0
Bahan Baku	0	0	0
Barang dalam Proses	0	0	0
Persediaan untuk Tujuan Strategis	0	0	0
Persediaan Barang Hasil Sitaan	0	0	0
Persediaan lainnya	0	0	0
Jumlah	883.553	292.402	591.151

Semua barang persediaan yang tersaji dalam kondisi baik.

b. Tanah

Pada UAKPB Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya tidak memiliki tanah selama tahun 2019.

c. Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), terdapat mutasi tambah sebesar Rp. Rp. 0 (*nol rupiah*).

1) Alat Besar (3.01)

Tidak terdapat jenis Alat Besar pada UAKPB Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya Tahun 2019.

2) Alat Angkut (3.02)

Tidak terdapat jenis Alat Angkut pada UAKPB Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya Tahun 2019.

3) Alat Bengkel (3.03)

Tidak terdapat jenis Alat Bengkel pada UAKPB Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya Tahun 2019.

4) Alat Pertanian (3.04)

Tidak terdapat jenis Alat Pertanian pada UAKPB Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya Tahun 2019.

5) Alat Kantor (3.05)

Tidak terdapat jenis Alat Kantor pada UAKPB Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya Tahun 2019.

6) Alat Studio (3.06)

Tidak terdapat jenis Alat Studio pada UAKPB Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya Tahun 2019.

7) Alat Kedokteran (3.07)

Tidak terdapat jenis Alat Kedokteran pada UAKPB Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya Tahun 2019.

8) Alat Laboratorium (3.08)

Tidak ada jenis Alat Laboratorium pada UAKPB Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya selama periode Tahun 2019.

9) Alat Persenjataan (3.09)

Tidak ada jenis Alat Persenjataan pada UAKPB Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya selama periode Tahun 2019.

10) Komputer (3.10)

Tidak terdapat Komputer pada UAKPB Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya Tahun 2019.

11) Alat Eksplorasi (3.11)

Tidak terdapat jenis Alat Eksplorasi pada UAKPB Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya Tahun 2019.

12) Alat Pengeboran (3.12)

Tidak terdapat jenis Alat Pengeboran pada UAKPB Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya Tahun 2019.

13) Alat Produksi (3.13)

Tidak terdapat jenis Alat Produksi pada UAKPB Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya Tahun 2019.

14) Alat Bantu Eksplorasi (3.14)

Tidak terdapat jenis Alat Bantu Eksplorasi pada UAKPB Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya Tahun 2019.

15) Alat Keselamatan Kerja (3.15)

Tidak terdapat jenis Alat Keselamatan Kerja pada UAKPB Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya Tahun 2019.

16) Alat Peraga (3.16)

Tidak ada jenis Alat Peraga pada UAKPB Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya selama periode Tahun 2019.

17) Peralatan Proses Produksi (3.17)

Tidak ada jenis Peralatan Proses Produksi pada UAKPB Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya selama periode Tahun 2019.

18) Rambu-rambu (3.18)

Tidak ada jenis Rambu-rambu pada UAKPB Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya selama periode Tahun 2019.

19) Alat Olahraga (3.19)

Tidak ada jenis Alat Olahraga pada UAKPB Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya selama periode Tahun 2019.

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1.	3.01 Alat Besar	0	0	0
2.	3.02 Alat Angkut	0	0	0
3.	3.03 Alat Bengkel	0	0	0
4.	3.04 Alat Pertanian	0	0	0
5.	3.05 Alat Kantor	0	0	0
6.	3.06 Alat Studio	0	0	0
7.	3.07 Alat Kedokteran	0	0	0
8.	3.08 Alat Laboratorium	0	0	0
9.	3.09 Alat Persenjataan	0	0	0

10.	3.10 Komputer	0	0	0
11.	3.11 Alat Eksplorasi	0	0	0
12.	3.12 Alat Pengeboran	0	0	0
13.	3.13 Alat Produksi	0	0	0
14.	3.14 Alat Bantu Eksplorasi	0	0	0
15.	3.15 Alat Keselamatan Kerja	0	0	0
16.	3.16 Alat Peraga	0	0	0
17.	3.17 Peralatan Proses Produksi	0	0	0
18.	3.18 Rambu-rambu	0	0	0
19.	3.19 Alat Olahraga	0	0	0
Total		0	0	0

d. Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp. 0 (*nol rupiah*).

Rincian Gedung dan Bangunan per bidang barang adalah sebagai berikut :

1) Bangunan Gedung (4.01)

Tidak ada Bangunan gedung pada UAKPB Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya per 31 Desember 2019.

2) Monumen (4.02)

Tidak ada jenis Monumen pada UAKPB Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya selama periode Tahun 2019.

3) Menara (4.03)

Tidak ada jenis Monumen pada UAKPB Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya selama periode Tahun 2019.

4) Tugu Titik Kontrol/Pasti (4.04)

Tidak ada Tugu Titik Kontrol pada UAKPB Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya per 31 Desember 2019.

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1.	4.01 Bangunan Gedung	0	0	0
2.	4.02 Monumen	0	0	0
3.	4.03 Menara	0	0	0
4.	4.04 Tugu Titik Kontrol/Pasti	0	0	0
Total		0	0	0

e. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Tidak ada Jalan, Irigasi dan Jaringan pada UAKPB Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya per 31 Desember 2019.

Rincian Jalan, Irigasi, dan Jaringan per bidang barang adalah sebagai berikut :

1) Jalan dan Jembatan (5.01)

Tidak ada Jalan dan Jembatan pada UAKPB Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya per 31 Desember 2019.

2) Bangunan Air (5.02)

Tidak ada Bangunan Air pada UAKPB Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya per 31 Desember 2019.

3) Instalasi (5.03)

Tidak ada Instalasi pada UAKPB Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya per 31 Desember 2019.

4) Jaringan (5.04)

Tidak ada Jaringan pada UAKPB Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya per 31 Desember 2019.

Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1.	5.01 Jalan dan Jembatan	0	0	0
2.	5.02 Bangunan Air	0	0	0
3.	5.03 Instalasi	0	0	0
4.	5.04 Jaringan	0	0	0
Total		0	0	0

f. Aset Tetap Lainnya

Tidak ada Aset Tetap Lainnya pada UAKPB Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya per 31 Desember 2019.

1) Bahan Perpustakaan (6.01)

Tidak ada Bahan Perpustakaan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya per 31 Desember 2019.

2) Barang Bercorak Kesenian (6.02)

Tidak ada Barang Bercorak Kesenian pada UAKPB Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya per 31 Desember 2019.

3) Hewan (6.03)

Tidak ada kelompok Hewan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya per 31 Desember 2019.

4) Ikan (6.04)

Tidak ada kelompok Ikan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya per 31 Desember 2019.

5) Tanaman (6.05)

Tidak ada kelompok Tanaman pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya per 31 Desember 2019.

6) Aset Tetap dalam Renovasi (6.06)

Tidak ada Aset Tetap dalam Renovasi pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya per 31 Desember 2019.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1.	6.01 Bahan Perpustakaan	0	0	0
2.	6.02 Barang Bercorak Kesenian	0	0	0
3.	6.03 Hewan	0	0	0
4.	6.04 Ikan	0	0	0
5.	6.05 Tanaman	0	0	0
6.	6.06 Aset Tetap dalam Renovasi	0	0	0
Total		0	0	0

g. Konstruksi dalam Pengerjaan

Tidak ada Konstruksi dalam Pengerjaan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya periode Tahun 2019.

h. Aset Lainnya

Tidak ada Aset Lainnya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya periode Tahun 2019.

i. BMN berupa Aset Bersejarah

Tidak ada BMN berupa Aset Bersejarah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya selama periode Tahun 2019.

3. Barang Milik Negara**a. BMN per akun neraca**

Nilai BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya per 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 591.151,00 (*lima ratus sembilan puluh satu ribu seratus lima puluh satu rupiah*). Nilai BMN dimaksud disajikan berdasarkan klasifikasi pos-pos perkiraan Neraca yaitu : Persediaan, Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi dalam Pengerjaan, dan Aset Lainnya.

Penyajian nilai BMN dalam pos perkiraan Neraca tersebut dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN NERACA	INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL		GABUNGAN	
		RP.	%	RP.	%	RP.	%
	Aset Lancar						
	Persediaan	591.151		0		591.151	
	Sub Jumlah	0		0		0	
	Aset Tetap						
	Tanah	0		0		0	
	Peralatan dan Mesin	0		0		0	
	Gedung dan Bangunan	0		0		0	
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0		0		0	
	Aset Tetap Lainnya	0		0		0	
	Konstruksi dalam Pengerjaan	0		0		0	

Sub Jumlah	0	0	0
Konstruksi dalam Pengerjaan			
Sub Jumlah			
Aset Lainnya			
Kemitraan dengan Pihak Ketiga			
Aset tak Berwujud			
Aset yang dihentikan dari penggunaan Operasional Pemerintah			
Total	591.151	0	591.151

Rincian nilai Akumulasi Penyusutan BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya per 31 Desember 2019 per perkiraan Neraca adalah sebagai berikut :

URAIAN NERACA	INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL		GABUNGAN	
	RP.	%	RP.	%	RP.	%
Aset Tetap	0		0		0	
Peralatan mesin	0		0		0	
Gedung dan Bangunan	0		0		0	
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0		0		0	
Aset Tetap Lainnya	0		0		0	
Aset Lainnya	0		0		0	
Kemitraan dengan pihak ketiga	0		0		0	
Aset yang dihentikan dari penggunaan operasional Pemerintah	0		0		0	
Total	0		0		0	

b. Perbandingan Nilai BMN pada Laporan Barang dan Laporan Keuangan

Perbandingan antara nilai BMN yang disajikan dalam laporan barang dan laporan keuangan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya per 31 Januari 2019 per akun neraca adalah sebagai berikut :

NAMA ASET	LAPORAN BARANG	LAPORAN KEUANGAN	SELISIH
Persediaan	591.151	591.151	0
Tanah	0	0	0
Peralatan dan Mesin	0	0	0
Gedung dan Bangunan	0	0	0
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	0
Aset Tetap Lainnya	0	0	0
Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0	0
Aset tak Berwujud	0	0	0
Aset Lain-lain	0	0	0
Total	591.151	591.151	0

V. Informasi BMN Lainnya

1. Perkembangan Nilai BMN

Perkembangan nilai BMN secara gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) selama 5 (lima) periode laporan terakhir, dapat disajikan secara berikut :

NO	PERIODE PELAPORAN	NILAI BMN		PERKEMBANGAN	
		RP.	RP.	RP.	%.
1	2019 (Tahunan)	591.151	(292.402)	(49,46)	
2	2018 (Tahunan)	883.553	82.203	9,3	

3	2017 (Tahunan)	801.350	801.350	100
4	2016 (Tahunan)	0	0	0
5	2015 (Tahunan)	0	0	0

2. Informasi Pengelolaan BMN

a. Penetapan Status Penggunaan BMN

Nilai BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN	SUDAH DITETAPKAN STATUS PENGGUNAAN	BELUM DITETAPKAN STATUS PENGGUNAAN
		RP.	RP.
1	Tanah	0	0
2	Peralatan dan Mesin	0	0
3	Gedung dan Bangunan	0	0
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0
5	Aset Tetap Lainnya	0	0
Jumlah			

b. Pengelolaan BMN

NO	URAIAN	PENGGUNAAN	PEMANFAATAN	PEMINDAHTANGANAN	PENGHAPUSAN	JUMLAH
		RP.	RP.	RP.	RP.	RP.
1	Dalam proses pengajuan permohonan ke pengguna barang	0	0	0	0	0
2	Dalam proses pengajuan permohonan ke	0	0	0	0	0

pengelola barang

3	Dalam proses pengelola barang	0	0	0	0	0
4	Selesai di pengelola barang	0	0	0	0	0
	a. Dikembalikan	0	0	0	0	0
	b. Ditolak	0	0	0	0	0
	c. Disetujui	0	0	0	0	0
5	Dalam proses tindak lanjut Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang	0	0	0	0	0
6	Telah diterbitkan keputusan dari pengguna barang	0	0	0	0	0
7	Tindak lanjut oleh Kuasa Pengguna Barang	0	0	0	0	0
9	Selesai Serah Terima	0	0	0	0	0

C. Pengelolaan BMN Idle

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Jumlah BMN yang teridentifikasi sebagai BMN Idle	
2	Ditetapkan sebagai BMN idle oleh pengelola	
3	Pemberitahuan bukan sebagai BMN idle oleh pengelola	
4	Telah diterbitkan Keputusan penghapusan dari pengguna	
5	Selesai serah terima kepada pengelola	

3. Informasi terkait BMN yang telah diusulkan penghapusannya kepada Pengelola Barang

a. Daftar barang hilang yang telah diusulkan Penghapusannya kepada Pengelola Barang

Tidak ada Nilai BMN hilang yang telah diusulkan penghapusannya kepada pengelola barang Pengerjaan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya per 31 Desember 2019.

b. Daftar barang dengan kondisi rusak berat yang telah diusulkan penghapusannya kepada pengelola barang

Tidak terdapat BMN dengan kondisi rusak berat yang telah diusulkan penghapusannya kepada pengelola barang pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya per 31 Desember 2019.

4. Permasalahan Pelaksanaan Penatausahaan BMN

Tidak ada Permasalahan-permasalahan yang perlu disampaikan terkait dengan pelaksanaan Penatausahaan dan Pengelolaan BMN.

5. Langkah-langkah Strategis sebagai Alternatif Permasalahan Masalah

Dalam rangka penyelesaian masalah terkait pelaksanaan Penatausahaan BMN ,belum ada langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan.

Penanggungjawab Laporan Barang Kuasa Pengguna
Tahunan Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya
per 31 Desember 2019
Kuasa Pengguna Barang,

